



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : DINAS SUMBER DAYA AIR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HENDRI
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 228735

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.873.451.289**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.650.000.000
2. Tanah Seluas 105 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 287 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.365.000.000
4. Tanah Seluas 957 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/150 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 580.000.000
6. Tanah Seluas 103 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 61 m2/61 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 427.742.242
8. Tanah dan Bangunan Seluas 43 m2/43 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 300.709.047

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **687.000.000**

1. MOBIL, HONDA HR-V MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000



2. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000
3. MOBIL, INNOVA ZENIX HYBRID Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000
4. MOTOR, HONDA HONDA VARIO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	142.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.872.813.491
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	7.575.264.780
III. HUTANG	Rp.	181.242.004
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.394.022.776

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.